STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PALOPO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

MUH. IQSAL BAHARUDDIN
NIM 15.04.02.0147

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019

STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PALOPO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh:

MUH. IQSAL BAHARUDDIN
NIM 15.04.02.0147

Di bimbing oleh:
Burhan Rifuddin, SE., M.M.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muh. Iqsal Baharuddin
NIM	: 15.0402.0147
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri, kutipan yang ada ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 19 Agustus 2019
Yang membuat per[illegible]

METERAI TEMPEL
TGL 20
BAEABAHF283746836
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUH. IQSAL BAH[illegible]
NIM. 15.0402.0147

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan**" yang ditulis oleh **Muh. Iqsal Baharuddin,** dengan **NIM 1504020147** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di*munaqasyah*kan pada hari Rabu **11 September 2019 M** bertepatan dengan **11 Muharram 144I H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memeroleh gelar Sarjana Ekonomi **(S.E).**

Palopo, 16 Oktober 2019 M
17 Safar 1441 H

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj. Ramlah M, M.M.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr.Muh. Ruslan Abdullah, M.A.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Ilham, S.Ag., M.A.	Penguji I	(.....)
4. Dr. Fasiha, M.EI.	Penguji II	(.....)
5. Burhan Rifuddin, SE.,M.M.	Pembimbing I	(.....)
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP.19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP.19861020 201503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN SAMPUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **v**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **vi**

NOTA DINAS PENGUJI I ..... **vii**

NOTA DINAS PENGUJI II ..... **viii**

PERSETUJUAN PENGUJI ..... **ix**

PRAKATA ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Definisi Operasional 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8
B. Kajian Pustaka 11
   1. Konsep Strategi 11
   2. Pengertian Nelayan 16
   3. Pendapatan Menurut Islam 18
   4. Pendapatan Nelayan 19
   5. Sistem Pembagian Nelayan 21
   6. Usaha Peningkatan Ekonomi dalam Rumah Tangga Nelayan 24
   7. Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam 25
   8. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Islam 26
C. Kerangka Fikir 27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis danPendekatan Penelitian 31
   1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
   2. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
   3. Sumber Data 31

4. Teknik Pengumpulan Data 32
5. Instrumen Penelitian 34
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 34

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo 35
B. Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo 44
C. Bidang Perikanan Tangkap 50
D. Pembahasan Hasil 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Muh. Iqsal Baharuddin, 2019. "Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Nelayan". Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh (Pembimbing I) Burhan Rifuddin, SE., M.M dan (Pembimbing II) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Kata Kunci: Strategi, Nelayan, Ekonomi Islam.

Skripsi ini membahas masalah yaitu: 1). Bagaimana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam peningkatan pendapatan Nelayan?, 2). Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam peningkatan pendapatan Nelayan?, 3). Apa kendala dan solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan dengan tiga tahapan yaitu: pertama, perencanaan seperti perikanan budidaya yang harus dikembangkan. Kedua pelaksanaan seperti memfasilitasi dan membiayai alat tangkap nelayan, penyediaan sarana dan prasarana, dan melakukan pembinaan dan pembimbingan masyarakat nelayan. Ketiga Evaluasi yaitu mengevaluasi semua program-program yang telah diberikan kepada nelayan. Dalam persfektif ekonomi Islam merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya dimana kebijakan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Adapun kendalanya yaitu pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kedua, program pelatihan kelompok nelayan terkadang banyak yang tidak memiliki waktu untuk mengikutinya. Solusinya yaitu dengan melakukan penyuluhan dan bimbingan peningkatan kapasitas SDM untuk menambah pengetahuan kelompok nelayan baik dalam penangkapan maupun pengolahan perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perikanan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah peradaban manusia. Perikanan tidak saja mengubah pola peradaban tetapi, juga telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan menjadi cara hidup dan kebutuhan ekonomi.[1]

Sektor perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya, nelayan kecil, pembubudidaya ikan kecil dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya hayati. Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peran penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat di daerah pesisir sangat bergantung hidupnya dari sektor perikanan sehingga tidaklah mengherankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai *"employment of the last resort"* di mana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.[2]

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak

[1] Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan* Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 7.

[2] Akhmad Fauzi, *Ekonomi Perikanan*, h. 9.

dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi dan dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya.

Sektor perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pembangunan perikanan di Kota Palopo di arahkan pada peningkatan konstribusi sektor perikanan dalam menunjang peran serta laju pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan Kota Palopo. Peningkatan konstribusi tersebut terutama dilaksanakan melalui peningkatan produksi yang berorientasi pada efisiensi usaha, peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan serta penyerapan tenaga kerja.

Salah satu kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapat penghasilan bersumber dari kegiatan menangkap ikan. Semakin banyak maka semakin besar pula pendapatan yang diterima dan pendapatan tersebut sebagian besa runtuk keperluan konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun pada kenyataannya masih banyak

nelayan belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat.[3]

Dengan dasar ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo berupaya untuk membangun dan mengembangkan pendapatan sesuai tuntutan kebutuhan dengan tahap memperhatikan kemampuan sumber daya alam yang dimiliki.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo terbentuk berdasarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang sebelumnya berbunyi dinas kelautan dan perikanan. Kemudian terbitlah peraturan walikota No.28 Tahun 2016 tentang struktur organisasi. Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan Kota Palopo sebagai turunan dari peraturan daerah di atas tersebut.[4]

Usaha pembangunan sektor perikanan memerlukan strategi yang inovatif. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor perikanan adalah Kota Palopo. Kota Palopo memiliki potensi laut yang cukup besar sehingga salah satu mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Selain itu, di Kota Palopo telah banyak berkembang usaha kecil yang juga telah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Hasil laut kota Palopo diantaranya ikan teri 1.076,3 ton, ikan belanak 384,1 ton, ikan bentong 1.602,4 ton, ikan banjar 281,3 ton, ikan kembung 2.193,3 ton, ikan layang anggur/malulugis 740,4 ton, ikan selar komo 1.714,9 ton, ikan tembang

---

[3]Sujarno, *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langka*t ".Thesis (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2008) diakses dari *repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7165/1/09E00282.pdf* pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 14.25

[4] Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

874,3 ton, ikan cakalang 784,7 ton, ikan tenggiri 723,3 ton, ikan kakap putih 278,3 ton, ikan tongkol abu-abu 85,4 ton, ikan cucut selndang 14,8 ton, ikan manyung 134,3 ton, ikan pinjolo 119,9 ton, ikan kurisi 332,2 ton, ikan biji nangka 3,1 ton, ikan layur 80,4 ton, ikan pari kembang/pari macan 6,2 ton, ikan beloso/buntut kebo 182,7 ton, ikan tatengke 89,6 ton, ikan rejung 50,0 ton ikan lencam 30,6 ton, ikan baronang 210,6 ton. dan masih banyak lagi hasil laut lainya seperti kepiting 47,6 ton, udang 825,3 ton, cumi-cumi 109,9 ton dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 16.951,9 ton sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 18.387,5.[5]

Kekayaan laut ini yang seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan melalui pemberdayaan agar tidak terjadinya penurunan pendapatan dan ketimpangan kemisikinan yang tidak sesuai dengan realitas dari potensi yang ada di masyarakat pesisir. Selain itu, diharapkan dengan adanya suatu pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri terlebih kepada pendapatan tahunan oleh pemerintah setempat yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam pemberian anggaran dana berupa bantuan.

Umumnya masyarakat pesisir mempunyai nilai budaya yang berorientasi selaras dengan alam, sehingga teknologi memanfaatkan sumber daya alam begitu besar. Teknologi adaptif dengan kondisi wilayah pesisir yang semakin kompleks dan kompetitif, nelayan sebagai pengelolah dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam berkaitan dengan tersedianya sumberdaya alam yang ada.

[5] Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2017-2018. 11/02/2019

Maka dari itu, diperlukan usaha pemberdayaan nelayan sebagai pengelolah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan nelayan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang "Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan".

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan?
3. Apa kendala dan solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan?

C. *Tujuan dan Manfaat Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah hal yang berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian tersebut, antara lain.

a. Untuk melihat strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam peningkatan pendapatan nelayan.
b. Untuk menganalisa tinjauan ekonomi Islam terhadap strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

c. Untuk mengetahui kendala dan solusi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

2. Manfaat Penelitian.

a. Secara teori, bahwa temuan penelitian ini diharapkan:

1) Dapat menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan.

2) Dapat mendeskripsikan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan nelayan.

b. Secara praktis, penelitian ini menjadi bentuk kontribusi yang positif dan referensi sebagai:

1) Bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

Bahan informasi strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

D. *Ruang Lingkup*

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini strategi merupakan salah satu langkah dan tindakan dalam menerapkan suatu keputusan yang dibuat.

2. Peningkatan pendapatan nelayan adalah bertambahnya harta atau berkurangnya hutang sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa dalam peroide tertentu. Nelayan adalah orang yang perkerjaannya menangkap ikan atau sumber utama pendapatannya dengan cara menangkap ikan. Dalam penelitian ini

pendapatan nelayan adalah bertambahnya harta atau berkurangnya hutang sebagai akibat dari penjualan barang oleh masyarakat kota Palopo yang mencari nafkah dengan cara menangkap ikan.

Dengan demikian yang di maksud dengan judul peneliti “Strategi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan ” adalah rencana mengenai kegiatan Pemerintah yang diimplementasikan dengan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan harta sebagai akibat penjualan barang oleh orang yang mencari nafkah dengan cara menangkap ikan di Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan ada sejumlah karya yang meneliti tentang kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan.

1. Alisa Noor Fathoni dalam penelitiannya *Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Cilacap*[6] diperlukan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan pendapatan nelayan yang akan berimbas kepada kesejahteraan mereka. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, strategi kebijakan pemerintah yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan pendapatan nelayan dengan cara menfasilitasi dan membiayai nelayan dalam menerbitkan sertifikat tanah mereka, memberikan bantuan berupa sarana dan prasaran, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nelayan. Persamaan penelitian Alisa Noor Fathoni dengan skripsi peneliti adalah sama-sama mengakaji mengenai nelayan. Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok,organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi peneliti adalah lokasi penelitian yang

[6] Aliza Noor Fathoni, " Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Cilacap, (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)", (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015), h. 5.

berbeda penelitian Aliza Noor Fathoni ada di Kabupaten Cilacap sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di Kota Palopo. Aliza Noor Fathoni meneliti strategi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan pemerintah oleh dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

2. Badrul Jamal dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ditulisnya berjudul, *Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan, (Studi Nelayan Pesisir Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)*[7] mengatakan permasalahan pokok yang dialami oleh nelayan desa Klampis adalah tingkat pendapatannya yang setiap tahunnya tetap dan hampir tidak berkembang. Modal dalam kehidupan nelayan merupakan hal pokok yang harus ada dalam kegiatan melaut. Beberapa modal yang dimiliki nelayan yaitu, sampan, jaring, mesin, solar, dan keterampilan. Modal tersebut adalah sarana yang dipakai nelayan untuk mencari ikan di laut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan desa Klampis Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. penelitian menggunakan data cross section dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal, umur, curahan jam kerja, pengalaman kerja, harga dan hasil tangkapan secara simultan berpengaruh

[7] Badrul Jamal, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan, (Studi Nelayan Pesisir Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)", (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 4 diakses dari *jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/10 26* pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.24.

signifikan terhadap pendapatan nelayan Desa Klampis. Persamaan penelitian Badrul Jamal dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menyinggung masalah pendapatan nelayan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda penelitian Badrul Jamal ada di Kabupaten Bangkalan sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di Kota Palopo. Badrul Jamal meneliti analisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan pemerintah oleh dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

3. Karof Alfentino Lamia dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nelayan Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan*[8] berpendapat bahwa faktor tenaga kerja secara nyata mempengaruhi pendapatan usaha nelayan di Kecamatan Tumpaan, di karenakan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam menangkap ikan dan dikarenakan dalam pengangkatan jaring dibutuhkan tenaga manual yang langsung dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan dari usaha nelayan.

Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui pengaruh faktor modal, tenaga kerja, pengalaman, dan lama pendidikan terhadap pendapatn nelayan di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan data primer. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda.

[8] Karof Alfentino Lamia ," Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nelayan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan" ,(Jurnal Emba Vol.1 No.4 Desember 2013), h. 1758 diakses dari *http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3371* pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 15.05

Sebelum dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dan strategi yang efektif untuk kegiatan peningkatan pendapatan nelayan, dan diharapkan pihak pemerintah dapat memberikan bantuan pada para nelayan dengan melakukan kerja sama dengan pihak lembaga keuangan bank dan non bank agar dapat memberikan pinjaman modal dan disamping itu peningkatan keahlian para nelayan perlu diperhatikan pemerintah melalui SKPD melalui program pelatihan.

Persamaan penelitian Karof Alfentino Lamia dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menyinggung masalah pendapatan nelayan. Sedangkan perbedaanya dengan skripsi peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda penelitian Karof Alfentino Lamia ada di Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan dalam skripsi ini penelitian berlokasi di Kota Palopo. Dalam jurnalnya Karof Alfentino Lamia meneliti analisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan, sedangkan peneliti mengkaji strategi kebijakan pemerintah oleh dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

B. *Kajian Pustaka*

1. Konsep Strategi

Strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Asal kata “strategi” turunan dari kata dalam Bahasa Yunani “*Strategos”*. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ia merupakan sebuah

rencana untuk sebuah kegiatan[9]. Didalamnya termasuk formulasi tujuan dan kumpulan rencana kegiatan. Hal itu mengindikasi adanya upaya memperkuat daya saing pekerjaan bisnis dalam mengelola organisasi dan mencegah pengaruh luar yang negatif pada kegiatan organisasi.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya[10].

Pada Awalnya konsep strategi didefinisiksansebagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generic ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang di gunakan dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang di gunakan oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan. Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk menenangkan pertempuran di gunakan istilah taktik.

Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategi, strategi tidak hanya di definisikan hanya semata-mata sebagai cara untuk mencapai tujuankarena strategi dalam konsep manejemen strategi mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri yang di harapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan bersaing perusahaan.[11]

Secara umum kita mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi

---

[9] Sedarmayanti, M. Manajemen Strategi. Bandung: PT. Refika Aditama, h. 76

[10] Rangkuti, F. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 132

[11] Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 69

terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan[12]. Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan pokok, kebijakan, dan rangkaian sebuah organisasi ke dalam satu kesatuan yang kohesif[13].

Berdasarkan definisi-definisi strategi yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yaitu salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi memiliki program atau kegiatan sehingga dibutuhkan strategi agar berjalan dengan baik dan adanya strategi juga membantu program dan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

a. Pentingnya strategi

Dalam mempelajari strategi, kita perlu mengetahui arti penting dan manfaat strategi. Banyak sekali arti penting dan manfaat strategi, antara lain:

1. Strategi merupakan cara untuk mengantisipasi tantangan-tangan dan kesempatan masa depan pada kondisi lingkungan perusahaan yang sangat cepat berkembang.
2. Strategi dapat memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan yang jelas bermanfaat pada semua karyawan
3. Pada saat ini, strategi banyak dipraktekan di dalam industry karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko.

[12] Rachmat. *Manajemen Strategik.* Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 97

[13] Iriantara, Y. *Manajemen Strategik Public Relations.* Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 43

4. Strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan, dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau sebaiknya.[14]

b. Strategi Kebijakan

Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur[15]. Implementasi strategi juga merupakan tugas mengubah kondisi sekarang, memotivasi SDM, mengembangkan kompetensi, memperbaiki kemampuan dan prose, menciptakan budaya organisasi, mencapai target berdasarkan potensi yang ada, serta berupaya untuk menghadapi perlawanan atas perubahan.

Menurut Brian W. Hongwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Proses pembuatan kebijakan, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
2) Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
3) Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari

[14] Supriono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 1998), h. 8

[15] J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis;* alih Bahasa Julianto Agung S. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, h. 89

jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

c. Dimensi-dimensi Strategi

1. Tujuan-tujuan sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan atau sasaran menyatakan apa saja yang perlu dicapai, kapan hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran nilai, menyatakan kearah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.
2. Kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan. Kebijakan (*Policies)* merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran spesifik.
3. Tahapan tindakan pokok atau program yang akan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama.

d. Komponen Strategi

Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan

dilaksanakan. Komponen tersebut adalah kompetensi yang berbeda, ruang lingkup dan distribusi sumber daya.

1. Kompetensi yang berbeda merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam pengertian, kompetensi ini bermakna kelebihan perusahaan di bandiing perusahaan lain.
2. Ruang lingkup merupakan lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beroperasi. Local, regional atau internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi. Oleh karenanya strategi yang akan dilakukan mencakup ruang lingkup yang dihadapi perusahaan.[16]
3. Distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menetapkan strategi perusahaan.

2. Pengertian Nelayan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 Tahun 1964, TLN No. 2690). Pengertian nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan, sedangkan nelayan penggarap

[16] Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 132

adalah semua orang yang menyediakan tenaganya untuk ikutserta dalam usaha penangkapan ikan di laut[17].

Secara geografis nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir yakni kawasan transisi antara wilayah darat dan laut[18]. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sisten nilai dan kebudayaan sebagai referensi prolaku mereka sehari-hari. Faktor kebudayaan ini yang menjadi pembeda antara masyarakat nelayan dan masyarakat lainnya. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya mengelola potensi sumberdaya perikanan. Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.

Menurut Hermanto nelayan dibedakan statusnya dalam usaha penangkapan ikan, status nelayan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia tidak ikut dalam operasi penangkapn ikan kelaut. Juragan darat menangung semua biaya operasi penangkapan.
b. Juragan Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan, tetapi dia ikut bertanggungjawab dalam operasi penangkapan ikan di laut.

[17] Retnowati, E. Nelayan Indonesia Dalam PusaranKemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *Perspektif,* XVI (3), h. 149-159

[18] Kusnadi. *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir.* Pusat Penelitian Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil. Lembaga Penelitian Universitas Jember. Jember: Universitas Jember, h. 152

c. Juragan Darat Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tagkap ikan serta ikut dalam operasi penangkapan ikan di laut. Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan.

d. Buruh atau pandega, yaitu orang yang tidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pandega pada umumnnya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian.

3. Pendapatan Menurut Islam

Dalam alquran Allah SWT mengajukan agar menghidupi kebutuhan sehari-hari manusia yaitu dengan mencari pengahasilan berupa pendapatan yang tertuang dalam alquran Surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[19]

Dari ayat diatas, dapat disimpilkan bahwa umat Islam jika telah selesai menunaikan shalatnya, diperintahkan Allah SWT untuk berusaha atau bekerja agar memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan, ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain-lain, kemudian iumat Islam diperintahkan mengingat Allah SWT di dalam maupun luar dari pada ibadah shalatnya, dan selalu berikhtiar yaitu giat berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulai disisi-Nya

[19] Alquran dan terjemahnya

dan terhormat dalam pandangan manusia. Metode pertama adalah *ujrah* (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dan sunnah.

Sabda Rasullah saw. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Umar, bahwa Nabi Muhammad saw, Bersabda Diriwayatkan dari Umar ra, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."[20]

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat bai katas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelah pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

4. Pendapatan Nelayan

Pendapatan nelayan adalah hasil yang diterima oleh seluruh rumah tangga nelayan setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan pada waktu tertentu. Namun hasil tangkapan ikan yang diperoleh belum bisa dikatakan sebagai pendapatan, jika belum terjadi transaksi jual beli. Transaksi yang dimaksud yaitu transaksi jual beli antara nelayan (produsen) dengan pembeli (konsumen) dan transaksi antara nelayan (produsen) dengan bandar ikan (distributor).

[20] Isnaini, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamdia Group, 2015), h. 84.

Pendapatan masyarakat nelayan bergantung terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat di lautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.

Bagi nelayan peralatan merupakan salah satu unsur produksi yang sangat menentukan keberhasilan nelayan, sekaligus merupakan sumber penghasilan nealayan. Selain dari hasil yang diperoleh dari usaha penangkapan ikan nelayan juga memperoleh penhasilan dari non usaha nelayan, seperti buruh bangunan, dagang, pengrajin, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki.

Pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dalam setiap rumahtangga mereka, misalnya membeli perlengkapan rumahtangga, membayar listrik bulanan, membayar bunga atas pinjaman atau utang lainnya, membeli sarana dan prasarana penangkapan ikan, biaya untuk melaut (seperti bensin bagi yang punya mesin, es, rokok, dll), dan bahkan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Selain itu peran istri dan anak juga dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan untuk meningkatkan jumlah pendapatan serta campur tangan pemerintah juga sangat penting dalam mengatasi masalah peningkatan pendapatan nelayan, misalnya

menciptakan program kerja nelayan dan sekaligus memberikan bantuan kepada nelayan berupa perahu, mesin, dan rakit.

5. Sistem Pembagian Nelayan

Dipilihnya sistem pembagian hasil ketimbang mekanisme upah atau gaji dalam menciptakan kadilan di bidang perikanan, baik kegiatan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap didasari oleh:

a. Kecendrungan bahwa nelayan memilih sistem bagi hasil dalam menentukan imbalan kerja yag mereka lakukan.
b. Sikap spekulatif (*gambling*) yang kuat mengakar dalam kehidupan nelayan.
c. Hasil tangkapan yang diperoleh dari usaha rakyat sektor penangkapan ikan masih tidak menentu.

Sedangkan alasan dari para juragan yang lebih suka memilih sistem bagi hasil adalah sebagai usaha untuk menghidari kerugian. Dengan kata lain, penerapan upah bagi para juragan berarti pengeluaran yang pasti. Padahal, usaha penagkapan ikan di laut bisa tidak menghasilkan apa-apa dalam waktu yang cikup lama.

Sistem pembagian hasil nelayan telah diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Amanat yang tertuang dalam konsideran menimbang Undang-undang (UU) No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan sangat mulia. Betapa tidak, ditentapkannya undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut

harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta mendapat bagian yang adil dari usaha itu.

Sebelum UU No. 16 tahun 1964 tersebut dikeluarkan, bagi hasil di bidang perikanan diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan hokum adat setempat yang menurut ukuran sosialisme Indonesia pada waktu itu belum memberikan dan menjamin bagian yang layak bagi nelayan penggarap dan penggarap tambak. Oleh karena itu, ketentuan usaha perikanan yang pertama-tama diatur adalah perjanjian bagi hasil, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sifat pemerasan antar satu pihak ke pihah yang lain. Dengan kata lain, setiap orang yang ikut serta dalam usaha tersebut akan mendapat bagian yang sama dengan jasa yang disumbangkan.

Sementara itu, perjanjian bagi hasil menurut UU No. 16 Tahun 1964, yang telah disetujui sebelumnya (lembaran Negara No. 16 Tahun 1964). Pasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 1964, menyebutkan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut, yaitu:

a. Untuk Perikanan Laut

Jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih diberikan kepada nelayan penggarap atau nelayan pandega. sedangkan, jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih diberikan kepada nelayan penggarap atau nelayan pandega. Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan pihak nelayan penggarap antara lain: ongkos lelang, uang rokok/jajan

dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disyahkan oleh Pemerintah Kota Palopo yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian dan lain-lainnya. Sedangkan beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik antara lain ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya.

b. Untuk Perikanan Darat

Mengenai hasil ikan pemeliharaan: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih; sedangkan, mengenai hasil ikan liar: minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor dibeikan pada nelayan penggarap tambak.

Bahan-bahan yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, yaitu uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaya untuk pengeduk saluran (*caren*), biaya-biaya untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran yang mengairi tambak yang diusahakan itu. Sedangkan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan pemilik tambak, disediakannya tambak dengan pintu-air dalam keadaan yang mencukupi kebutuhan, biaya untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air yang tidak dapat dipakai lagi serta pembayaran pajak tanah yang bersangkutan, bahan-bahan yang menjadi tanggungan penggarap tambak. biaya untuk menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan pemeliharaan ikan di dalam tambak, dan penangkapannya pada waktu panen.

6. Usaha Peningkatan Ekonomi dalam Rumah Tangga Nelayan

Perekonomian dalam keluarga dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan secara kontinue dalam jangka panjang terhadap tingkat pemennuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan selalu dikaitkan dengan pendapatan atau harta yang dimilikinya, tinggi rendahnya pendapatan membawa dampak pada kondisi ekonomi dalam keluarga. Secara umum ada hubungan antara tingkat konsumsi dengan penerimaan (pendapatan). Peningkatan pendapatan akan membuat jumlah pemennuhan kebutuhan menaik, sebaliknya penurunan pendapatan akan mengurangi jumlah kebutuhan yang ingin diperoleh. Apabila penurunan pendapatan tersebut terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang akan membawa akibat kemiskinan bagi masyarakat atau rumah tangga nelayan. Namun apabila penurunan jumlah pendapatan dapat segera diatasi dengan baik, kondisi ekonomi akan membaik pula.

Secara singkat usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan rumahtangga nelayan yaitu:

a. Mengubah paradigma berfikir

Yaitu mencoba melakukan hal-hal yang baru dengan menciptakan suasana hidup yang baru, misalnya dengan berwirausaha. Wirausaha merupakan bentuk usaha yang menjanjikan kesuksesan bagi orang yang mau melakukan dan terus mengembangkannya.

b. Mengubah gaya hidup

Masyarakat nelayan biasanya memiliki kebiasaan berhura-hura, mengkonsumsi tanpa memperhatikan kondisi ekonomi, membelanjakan uang pada

barang-barang yang tidak berguna, seperti minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Hal demikianlah yang harus ditinggalkan agar kondisi ekonomi masyarakat nelayan membaik.

7. Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam

Tujuan dari suatu sistem ekonomi sangat dipengaruhi oleh pandangan dunianya. Salah satunya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana alam semesta muncul, makna dan tujuan hidup manusia, kepemilikan dan penggunaan objektif sumber daya yang langka untuk kehidupan manusia, serta hubungan antar sesame manusia (termasuk ghak dan kewajiban mereka) juga pada lingkungan.[21] Sebagai contoh, jika pandangan mengenai alam semesta tercipta dengan sendirinya, maka akibatnya manusia tidak perlu bertanggungjawab pada siapapun dan hidup bebas sesukanya. Jika diyakini bahwa manusia hanyalah pion-pion dalam papan catur sejarah dan kehidupan mereka ditentukan oleh kekuatan dari luar di mana mereka tidak memiliki control, sehingga mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi disekeliling mereka dan tidak perlu khawatir dengan ketidak adilan yang terjadi.[22]

Prinsip-prinsip ekonomi pembangunan dalam Islam yaitu:[23]

1. *Tauhid Ulihiyyah,* yaitu percaya pada Kemahatunggalan Allah dan semua yang di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia

[21] Umer Chapra, *Islam and Economic Development,* (Islamabad Islamic Research Institute Pres: 1993), h. 93

[22] *Ibid*

[23] Mudrajat Kuncoro; Ph.D, *Masalah, Kebijakan, dan Politik; Ekonometrika Pembangunan,* (Jakarta: Penerbit Erlangga 2010), h. 23-24

adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi.

2. *Tauhid Rububiyyah,* yaitu percaya bahwa tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptanya serta menurut siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri, tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrim, sikap fatalistik tidak dibenarkan sementara pada titik ekstrim lainnya, kepercayaan sepenuhnya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.
3. *Khilafah,* yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di Bumi. Disamping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
4. *Tazkiyyah an-nas,* ini merujuk kepada pertumbuhan dan penyucian manusia sebagai prasyarat yang diperlukan sebelum manusia menjalankan tanggung jawab yang ditugaskan kepadanya. Manusia adalah agen perubahan dan pembangunan. Oleh karena itu, perubahan dan pembangunan apa pun yang terjadi sebagai akibat upaya manusia ditujukan bagi kebaikan lain dan tidak hanya bagi pemenuhan kepentingan pribadi.
5. *Al-falah,* yaitu konsep keberhasilan dalam Islam bahwa keberhasilan apa pun yang dicapai di kehidupan dunia akan mempengaruhi keberhasilan di akhirat

sepanjang keberhasilan yang dicapai semasa hidup di dunia tidak menyalahi petunjuk atau bimbingan yang telah Tuhan tetapkan. Oleh karena itu, tidak ada di antara upaya-upaya bagi pembangunan di dunia ataupun persiapan bagi kehidupan akhirat.

6. *'adalah,* tanpa disertai keadilan sosio-ekonomi, persaudaraan yang merupakan satu bagian integral dari konsep-konsep seblumnya akan tetap menjadi konsep yang tidak memiliki subtansi. Rasulullah sangat tegas dalam menghadapi perihal keadilan, bahkan Rasulullah menyamakan ketikadilan dengan *dzulm* "kegelapan mutlak". Ibnu Taimiyah juga menegaskan akan pentingnya keadilan. "Tuhan menegakkan negeri yang adil meskipun kafir, tetapi tidak menegakkan negeri yang tidak adil meskipun beriman.[24]
7. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkanpemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah),* serta kehidupan yang baik dan terhormat

[24] Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi,* (Surabaya: Risalah Gusti 1999), h. 229-230

(al-hayah al-thayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan saran untuk mencapai keadilan, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan rill masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indicator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indicator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktififkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang

tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung resiko, maka islam juga memberikan alternatif lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Alqur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam QS. Quraisy/106:3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (٣

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤

Terjemahnya:

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut"[25].

Berdasrkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

C. *Kerangka Pikir*

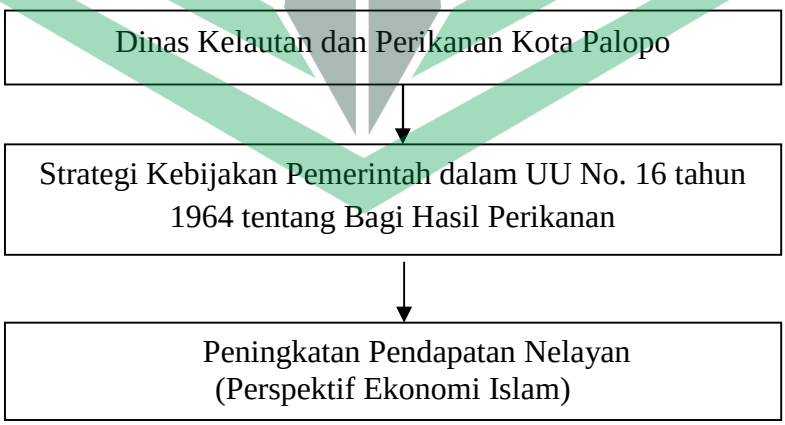

[25] Alqur'an dan Terjemahnya

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adapun strategi yang dimaksud yaitu strategi kebijakan pemerintah dalam UU No. 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dengan harapan terjadinya peningkatan pendapatan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, Jenis penelitian dalam skripsi yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang titak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo. Peneliti tertarik mengambil di tempat penelitian tersebut karena letaknya sangat strategis dan dapat dijangkau.

b. Waktu penelitian

Waktu dalam penelitian ini adalah pada bulan Mei sampai dengan Juli 2019 Kota Palopo.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan

datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan.[26]

1. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contoh data kuesioner, data observasi dan sebaginya.[27]

2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini seharusnya atau biasanya diproleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contoh: Data yang tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti di perpustkaan, kantor-kantor dan sebagainya.[28]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[29] Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian, maka diperlukan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

---

[26] Suharisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

[27] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 19.

[28] *Ibid*

[29] Ridwan, *Belajar Mudah penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 69.

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan teknik *Field Research* yaitu data yang diambil dari lapangan dengan menggunakan teknik:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto, rekaman dan laporan-laporan dari pihak resmi terkait. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

2. Wawancara

Sugiono menjelaskan wawancara mendalam yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang diguanakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[30] Menurut Burhan Bungin wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

Operasional dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nelayan secara lisan ataupun tertulis. Adapun untuk informasinya di tujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo.

[30] *Ibid*., h. 140.

5. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:

a. Peneliti sebagai instrumen (*human instrument*).

b. Buku catatan, camera, dan lain-lain.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui prosedur pengumpulan data, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa data. Dalam menganalisa data yang tersedia peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian langsung dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data, lalu laporan-laporan tersebut direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data, yaitu penyajian kesimpulan informasi sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan, verifikasi data-data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kota Palopo*

1. Letak Geografis dan Data Administrasi

Kota Palopo terlatak anatara 2° 53' 15' - 3° 04' 08' Lintang Selatan dan 120° 03' 10' - 120° 14' 34' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:[31]

Sebelah Utara: Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu

Sebelah Selatan: Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu

Sebelah Timur: Teluk Bone

Sebelah Barat: Kecamatan Tondon Nanggala, Kabupaten Tanah Toraja Utara

Secara umum, luas wilayah Kota Palopo kurang Iebih 247,52 km2 atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan secara administrasi pemerintahan terdiri dari 9 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 48 Kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Wara terdiri dari 6 Kelurahan, Yaitu: Kel.Amassangan, Kel.Boting, Kel.Dangerakko, Kel.Tompotikka, Kel.Lagaligo dan Kel.Pajalesang.
2. Kecamatan Wara Utara terdiri dari 6 Kelurahan, Yaitu: Kel.Batupasi, Kel.Penggoli, Kel.Sabbamparu, Kel.Luminda, Kel.Salubulo, Kel.Patte'ne.

[31] Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018

3. Kecamatan Wara Selatan terdiri dari 4 Kelurahan, Yaitu: Kel.Sampoddo, Kel.Songka, Ke|.Takkalala, KeI.Binturu.
4. Kecamatan Wara Timur terdiri dari 7 Kelurahan, Yaitu: Kel.Benteng, Kel.Surutanga, Kel.Pontap, KeI.Malatunrung, Kel.SaIekoe, Kel.Salutellue, Kel.Ponjalae.
5. Kecamatan Wara Barat terdiri dari 5 kelurahan, Yaitu: Kel.Tomarundung, Kel.Battang, Kel.Lebang, Kel.Battang Barat, Kel.Padang Lambe.
6. Kecamatan Sendana terdiri dari 4 Kelurahan, Yaitu: Kel.Peta, Kel.Mawa, Kel.Purangl, Kel.Sendana.
7. Kecamatan Mungkajang terdiri dari 4 Kelurahan, Yaitu: Kel.Mungkajang, Kel.Murante, Kel.Latuppa, Kel.Kambo.
8. Kecamatan Bara terdiri dari 5 kelurahan, Yaitu: Kel.Rampoang, Kel.Temmalebba, Kel.Balandai, Kel.To‘Bulung, Kel.Buntu Datu.
9. Kecamatan Telluwanua terdiri dari 7 Kelurahan, Yaitu: Kel.Mancani, Kel.Maroangin, Kel.Jaya, Kel.Salubattang, Kel.Sumarambu, Kel.Batu Walenrang dan Kel.Pentojangan.

Dari 9 Kecamatan dan 48 kelurahan dalam wilayah Kota Palopo terdapat 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan yang rnenjadi wilayah pesisir.

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Wara Utara	1. Kel. Batu Pasi 2. Kel. Penggoli 3. Kel. Sabbangparu 4. Kel. Salubulo
2.	Wara Selatan	1. Kel. Sampoddo 2. Kel. Songka 3. Kel. Takkala 4. Kel. Binturu
3.	Wara Timur	1. Kel. Benteng 2. Kel. Pontap 3. Kel. Malatunrung 4. Kel. Salekoe 5. Kel. Salutellue 6. Kel. Ponjalae
4.	Bara	1. Kel. Rampoang 2. Kel. Balandai 3. Kel. Temmalebba 4. Kel. Buntu Datu
5.	Telluwanua	1. Kel. Salubattang 2. Kel. Batu Walenrang

2. Visi Misi Dinas Perikanan Kota Palopo

a. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaran tugas dan fungsi. Dinas perikanan Kota Palopo bertanggung jawab untuk membantu walikota dalam penyelenggaran

pembangunan dibidang perikanan. Dinas perikanan sebagai bagian organisasi perangkat daerah (OPD) akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah. Visi dinas perikanan Kota Palopo tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan, Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada dinas perikanan.

Adapun misi dinas perikanan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas SDM aparatur dan masyarakat perikanan kelautan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan.
2. Melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal.
3. Mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat pesisir laut.
4. Mengembangkan infrastruktur sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

3. Keadaan Demografi

Penduduk Kota Palopo berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (*Sussenas)* tahun 2018 berjumlah 176.907 jiwa yang terdistribusi pada Sembilan kecamatan. Tingkat kepadatan penduduk di sembilan kecamatan bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tofografi, potensi wilayah dan

konsentrasi penduduk Kota Palopo, tingkat kepadatan perkecamatan dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Palopo Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas ($Km^{2)}$	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan ($Jiwa/Km^{2)}$
1.	Wara Selatan	11.598	10,66	2.539	1.088
2.	Sendana	6.546	37,09	1.246	176
3.	Wara	38.286	11,09	8.808	3.332
4.	Wara Timur	38.042	12,08	7.584	3.149
5.	Mungkajang	7.933	53,8	1.608	147
6.	Wara Utara	22.637	10,58	4.414	2.140
7.	Bara	27.580	23,34	5.387	1.181
8.	Telluwana	13.328	34,34	2.593	388
9.	Wara Barat	10.95	54,13	2.174	202
	Jumlah	**176.907**	**247,52**	**35.621**	**715**

Sumber data: Palopo dalam angka tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 176.907 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 85.967 jiwa dan perempuan sebanyak 90.940 jiwa.

Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2018

No.	Kecamatan	Rumah Tangga Perikanan Budidaya (Jiwa)	Rumah Tangga Perikanan Tangkap (Jiwa)	Jumlah
1.	Wara Selatan	330	179	509
2.	Sendana	117	-	117
3.	Wara	25	-	25

4.	Wara Timur	341	438	779
5.	Mungkajang	56	-	56
6.	Wara Utara	120	202	322
7.	Bara	210	140	350
8.	Telluwanua	291	54	345
9.	Wara Barat	498	-	498
	Jumlah	**1.988**	**1.013**	**3.001**

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya DP Kota Palopo Tahun 2018

Jumlah rumah tangga budidaya perikanan kota palopo tahun 2018 berjumlah 1.988 jiwa sedangkan jumlah rumah tangga perikanan tangkap berjumlah 1.013 jiwa dengan jumlah total RTP berjumlah 3.001 jiwa.

4. Potensi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo

Posisi Kota Palopo yang terletak dikawasan teluk bone dengan panjang garis pantai kurang lebih 21 km dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di wilayah Kota Palopo terdiri dari sektor penangkapan ikan di laut, pembudidayaan ikan di lahan tambak, perairan umum, kolam maupun daerah persawahan. Penangkapan ikan di laut merupakan salah satu sumber perekonomian di wilayah pesisir pantai dalam upaya peningkatan tingkat kesejahteraan hidup nelayan. Pengembangan penangkapan ikan di wilayah pesisir harus dibarengi dengan peningkatan alat penangkapan ikan dan metode penangkapan yang dapat meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan.

a. Potensi Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air di alam (laut dan sungai). Merupakan usaha menangkap ikan di laut. Usaha itu

dilakukan diperairan pantai atau ditengah laut. Para nelayan menangkap ikan di laut menggunakan dua macam cara yaitu cara tradisional dan cara modern. Nelayan tradisional hanya mengandalkan peralatan sederhana berupa perahu layar dan peralatan menangkap ikan seperti pancing, jala, dan jaring sehingga jumlah ikan yang ditangkap sedikit. Sedangkan penangkapan ikansecara modern yaitu menggunakan kapal motor yang dilengkapi kapal pendingin dan menggunakan penangkap ikan yang modern seperti purse seine sehingga hasil yang didapat cukup banyak.

Ada sepuluh kelompok jenis ikan yaitu:

1. Pelagis besar 2
2. Pelagis kecil
3. Demersal
4. Ikan karang
5. Ikan hias
6. Udang dan krustacea lainnya
7. Kekerangan, molusca dan teripang
8. Mamalia dan reptile
9. Rumput laut
10. Benih alam komersial

Perairan laut dan pesisir Kota Palopo secara administratif terletak diujung utara kawasan laut teluk Bone dan sebelah Barat dari perairan laut Sulawesi Tenggara. Pengelolaan penangkapan ikan di Teluk Bone memberikan kontribusi yang besar terhadap hasil produksi perikanan tangkap di Kota Palopo. Produksi

perikanan tangkap tahun 2018 yaitu sebesar 18.387,5 ton, jika dibandingkan pada tahun 2017 produksi perikanan sebesar 16.951,9 ton maka produksi di tahun 2018 terjadi peningkatan.

Adapun potensi perikanan tangkap yang ada di Kota Palopo dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Potensi perikanan Tangkap Tahun 2018

No.	Uraian	Keterangan
1.	Panjang garis pantai	± 21 Km^2
2.	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	1 Unit
3.	Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI)	1 Unit
4.	Jumlah kapal mendarat	3.525 Unit
5.	Jumlah nelayan	2.901 Orang
6.	Jumlah RTP	1.013 RTP
7.	Jumlah pilau-pulau kecil	1 Pulau
8.	Jumlah POKMASWAS	7 Kelompok

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DP Kota Palopo Tahun 2018

b. Potensi Perikanan Budidaya

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangan ikan atau organisme lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air yang seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.

Sebagai kota maritim, kota palopo memeiliki komoditas unggulan rumput laut Gracellaria dengan kualitas terbaik di dunia dan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia perikanan. Ada dua jenis rumput laut yang

dibudidayakan di kota palopo yaitu E.Cottoni yang dibudidayakan di laut dan Gracillaria dibudidayakan di tambak.

Tabel 5. Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2018

No.	Uraian	Keterangan
1.	Budidaya air payau	1.565,5 Ha
2.	Budidaya air tawar	1.235,2 Ha
3.	Budidaya laut	1.830 Ha
4.	Balai benih ikan	1 Unit
5.	Pembudidayan	4.128 Orang

Sumber data: Bidang Perikanan Budidaya DP Kota Palopo Tahun 2018

c. Potensi Penguatan Daya Saing produk Usaha Perikanan (PDSPUP)

Pengolahan adalah rangkaian kegiatan dan atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk komsumsi manusia. Sedangkan untuk pengelolahan ikan adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki perorangan, kelompok maupun badan usaha.

Adapun potensi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan kota palopo dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Potensi PDSPUP Tahun 2018

No.	Uraian	Keterangan
1.	Unit pengolahan ikan (UPI)	83 Unit
2.	Pemasar produksi perikanan	558 Orang
3.	Pengolah ikan	289 Orang
4.	Pabrik es	4 Unit
5.	Pasar ikan	2 Unit
6.	Gedung pengolahan	1 Unit
7.	Kios pemasaran	1 Unit

8.	Gedung rumput laut	3 Unit
9.	Cold strage	1 Unit
10.	Ice flake	2 Unit

Sumber data: Bidang PDSPUP DP Kota Palopo Tahun 2018

B. *Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Palopo*

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja dinas kelautan dan perikanan Kota Palopo ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA) Nomer 03 Tahun 2008. Bagan struktur organisasi dan susunan pejabat dalam struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 7 sebagai berikut:

Gambar 1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Palopo dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor: 08 Tahun 2016

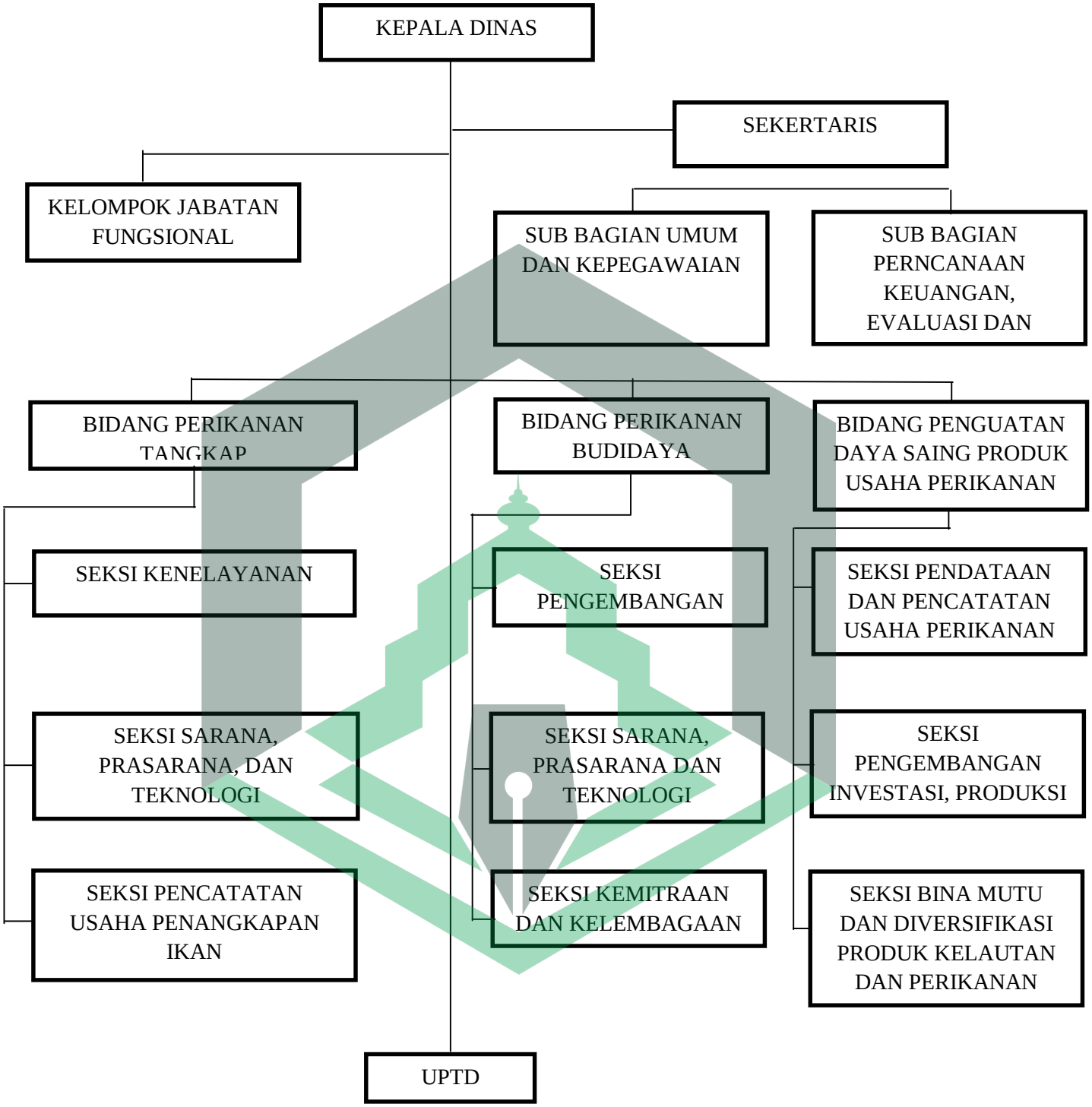
KEPALA DINAS
SEKERTARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERNCANAAN KEUANGAN, EVALUASI DAN
BIDANG PERIKANAN TANGKAP
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
BIDANG PENGUATAN DAYA SAING PRODUK USAHA PERIKANAN
SEKSI KENELAYANAN
SEKSI PENGEMBANGAN
SEKSI PENDATAAN DAN PENCATATAN USAHA PERIKANAN
SEKSI SARANA, PRASARANA, DAN TEKNOLOGI
SEKSI SARANA, PRASARANA DAN TEKNOLOGI
SEKSI PENGEMBANGAN INVESTASI, PRODUKSI
SEKSI PENCATATAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
SEKSI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN
SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
UPTD

a. Kepala Dinas

Kepala dinas bertugas melaksanakan penyelanggaran urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekertaris

Sekertaris bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi sub bagian dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan tindak lanjut.

c. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang perikanan tangkap mempunyaitugas pokok melaksanakan pengembangan sarana, membimbing, mengendalikan dan mengawasi seksi kenelayanan, seksi sarana dan prasarana dan teknologi penangkapan ikan dan seksi pencatatan usaha penangkapan ikan,

d. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang perikanan budidaya memepunyai tugas pokok melaksanakankegiatan fasilitas, peningkatan kualitas manajemen dan teknologi produksi usaha hasil perikanan budidaya, membimbing, mengendalikan dan mengawasi seksi pengembangan SDM pembudidaya, seksi sarana dan prasarana dan teknologi budidaya, seksi kemitraan dan kelembagaan bagian usaha budidaya.

e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Usaha Perikanan

Bidang peningkatan daya saing produk usaha perikanan produk usaha mempunyai tugas pokok melaksanan pembinaan usaha pengolahan dan pemasaran, pengembangan sarana produk perikanan, membimbing,

mengendalikan dan mengawasi seksi pendataan dan pencatatan usaha perikanan, pengembangan investigasi, promosi dan sistem logistic dan bina mutu dan diversifikasi produk perikanan.

2. Keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo tahun anggaran 2016 serta peraturan walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota palopo tahun anggaran 2018 dengan dasar tersebut ditetapkan target PAD sebesar Rp. 262.675.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Pendapatan asli daerah (PAD) tersebut bersumber dari:

A. Retribusi Daerah terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Usaha

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1. Sewa bangunan
2. Sewa gudang
3. Sewa pabrik es
4. Sewa cold strage
5. Sewa gedung pengolahan

b) Retribusi Tempat Pelelangan

1. Jasa TPI
2. Pos masuk

b. Retribusi Perizinan Tertentu

c) Izin Usaha Perikanan

B. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

c. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

d) Penjualan Produksi Usaha

Untuk lebih terperinci jenis sumber PAD dan realisasi pada tahun 2018 dapat di lihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7: Jenis Sumber dan Realisasi PAD Dinas Perikanan Kota Palopo tahun 2018

No.	Jenis/Sumber PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	**Retribusi Jasa Usaha**			
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Daerah			
	- Sewa bangunan	15.675.000	18.478.000	117.88
	- Sewa gudang	73.750.000	92.500.000	125.42
	- Sewa pabrik es	46.000.000	41.000.000	89.13
	- Sewa gedung pengolahan	15.000.000	15.000.000	100.00
	- Sewa bangunan cold storage	10.000.000	15.000.000	150.00
	b. Retribusi Tempat Pelelngan	32.305.000		
	- Jasa TPI	62.195.000	29.500.000	91.32
	- Pos masuk		75.575.000	121.51
	Lain-lain Pendapatan Asli			

2.	**Daerah yang Sah** **a. Penjualan Hasil Perikanan** - Hasil penjualan produksi usaha daerah	7.750.000	9.980.000	128.77
	Jumlah	**262.675.000**	**297.033.000**	**113.08**

Sumber data: Bagian Sekretariat DP Kota Palopo

Realisasi Pendapatan AslI Daerah (PAD) Dimas Perikanan Kota Palopo dalam T.A 2018 adalah RP.297.033.000,- atau 113.08% dari target sebesar Rp. 262.675.000,-

b. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja

Pada tahun 2018 alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja tidak langsung: Rp. 3.737.990.219,-
2. Anggaran belamnja langsung terdiri dari
   - Belanja pegawai : Rp. 112.100.000,-
   - Belanja barang dan jasa : Rp. 6.354.738.500,-
   - Belanja modal : Rp. 935.582.000,-

Untuk lebih terperinci jenis belanja dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung dinas perikanan kota palopo tahun 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Jenis Belanja dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2018.

No.	Jenis Belanja	Pagu APBD (RP)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
I	Belanja tidak langsung	3.737.990.219,-	3.603.336.946,-	96.40
II	Belanja langsung			
	1. Belanja pegawai	112.100.000,-	112.100.000,-	100.00
	2. Belanja barang dan jasa	6.354.738.500,-	4.416.829.506,-	69.50
	3. Belanja modal	935.582.000,-	935.362.000,-	99.98
	Jumlah	**11.140.410.719,-**	**9.067.628.452,-**	**97.01**

Sumber data: Bagian Sekretariat DP Kota Palopo

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa dalam tahun anggaran 2018 total pagu belanja langsung dan tidak langsung adalah Rp.11.140.410.719,- dengan realisasi Rp.9.067.628.452,-. Atau sebesar 97.01%.

C. Bidang Perikanan Tangkap

a. Produksi Hasil Tangkapan

Produksi perikanan tangkap doiperoleh dari penangkapan di laut. Kota Palopo memiliki potensi perairan dengan 295 jenisikan karang dan berbagai jenis ikan konsumsi yang bernilai ekonomis tinggi seperti kerapu dan cakalang. Jenis ikan tangkapan di wilayah perairan Kota Palopo sangat beragam, antara lain jenis pelagis besar dan kecil, demersal, dan biota laut lainnya.

Adapun hasil tangkapan ikan nelayan Kota Palopo dalam tahun 2018 sebanyak 18.387,5 ton jika dibandingkan dengan produksi penangkapan sebesar 1.435,6 ton atau sekitar 1,17%. Peningkatan penangkapan ini disebabkan oleh cuaca yang baik dan alat tangkap yang sangrat mendukung untuk hasil tangkapan nelayan.

b. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan hasil komoditi yang diusahakan. Perbaikan pendapatan petani nelayan kota palopo terus diupayakan melalui usahah perbaikan dan penyempurnaan sarana/prasarana, maupun pembinaan dan penyuluhan yang berkelanjutan melalui memperkenalkan serta menerapkan teknologi yang di anjurkan, maupun memperbaiki mata rantai pemasaran ikan melalui informasi harga pasar ikan.

Tabel 9: Data Pendapatan Dinas Perikanan Periode 2017-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	270.070.000.-	279.997.000.-
2018	262.675.000.-	297.300.000.-

Sumber data: Bagian Sekretariat DP Kota Palopo

c. Jumlah Kelompok Nelayan di Kota Palopo

Tahun 2017

- Aktif : 127 Kelompok (1.416 Orang)
- Tidak Aktif : -

Tahun 2018

- Aktif : 134 Kelompok (1.495 Orang)
- Tidak Aktif : -

d. Kegiatan Rutin Dinas Perikanan

Tahun 2017

Penyediaan sarana dan prasarana kelautan:

- Pengadaan kapal + mesin 28PK

- Pengadaan kapal + mesin 13PK
- Pengadaan alat tangkap gill net ukuran mata 3”
- Pengadaan alat tangkap gill net ukuran mata 1,5”
- Pengadaan alat tangkap pancing rawai
- Pengadaan alat tangkap bubu/rakkang

Tahun 2018

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap:

- Pengadaan perahu + mesin 13 PK di Kec. Bara
- Pengadaan perahu + mesin 24 PK di Kec. Wara Timur
- Pengadaan perahu + mesin 24 PK di Kec. Wara Selatan
- Pengadaan gill net millennium (pukat) 5 inch di Kec. Wara Timur
- Pengadaan gill net millennium (pukat) 3,5 inch di Kec. Wara Utara
- Pengadaan waring di Kec. Wara Utara
- Pengadaan mesin 9 PK di Kec. Bara dan Wara Timur
- Pengadaan perahu bala-bala di Kec. Wara Timur
- Pengadaan mesin 14 PK di Kec. Wara Utara

Penyediaan sarana dan prasarana kelautan:

- Pengadaan perahu kapal ukuran dibawah 3GT + mesin 13 PK di Kec. Wara Timur
- Pengadaan perahu kapal ukuran dibawah 3GT + mesin 24 PK di Kec. Wara Timur
- Pengadaan perahu kapal ukuran dibawah 3GT + mesin 24 PK di Kec. Telluwanua

- Pengadaan alat tangkap gill net millennium (pukat) 5 inch
- Pengadaan alat tangkap gill net (pukat) 1,75 inch
- Pengadaan alat bantu penangkapan ikan (GPS)

e. Tenaga Kerja

Tahun 2018 ini jumlah tenaga kerja pada sektor kelautan dan perikanan sebanyak 7.876 orang yang terdiri dari nelayan sebanyak 2.901 orang, pembudidaya 4.128 orang, dan usaha pengolahan sebanayak 847 orang yang terdiri dari tenaga kerja pengolahan dan pemasaran sebanyak 558 orang sedankan di tahun 2017 jumlah tenaga kerja sebanyak 11.066 orang yang terdiri dari nelayan sebanyak 2.839 orang, pembudidaya 5.883 orang, dan usaha pengolahan dan pemasaran sebanayak 2.260 orang yang terdiri dari tenaga kerja pengolahan sebanayak 1.145 orang dan tenaga kerja pemasaran sebanyak 1.199 orang.

f. Armada Penangkapan dan Alat Tangkap

Penggunaan armada penangkapan ikan sebagai pendukung utama dalam operasi penangkapan ikan merupakan dasar keberhasilan penangkapan ikan. Banyaknya armada penangkapan berkaitan dengan jumlah hasil tangkapan ikan. Jumlah armada yang beroperasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9: Armada Penangkapan yang Beroperasi pada Tahun 2018

No.	Jenis Kapal	Jumlah (Unit)	
		2017	2018
1.	Kapal Motor	527	532
2.	Motor Tempel	433	481
	Jumlah	9 60	1.013

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap DP Kota Palopo

Dalam tahun 2017 jumlah armada penagkapan yang beroperasi diperairan kota palopo berjumlah 960 unit sedangkan dalam tahun 2018 jumlah armada yang beroperasi sebanyak 1.013 unit, dalam hal ini terjadi peningkatan jumlah armada yang beroperasi. pengguanaan alat tangkap nelayan kota palopo diarahkan agar lebih bervariasi dan lebih ramah lingkungan, dari satu jenis alat tangkap dapat menagkap ikan pada seluruh musim penangkapan ikan dan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan.

D. *Pembahasan Hasil Penelitian*

1. *Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Dalam Peningkatan Pendapatan Nelayan*

a. Perencanaan

Perencanaan ke depan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adalah perikanan budidaya yang seharusnya dikembangkan agar pendapatan nelayan dapat meningkat.[32]

Dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan yang mengedepankan perkanan budidaya dan mengendalikan perikanan tangkap perlu dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana perikanan. Jika tidak akan berdampak pada produksi sehingga pendapatan nelayan akan berkurang.[33]

Faktanya, masih kurangnya infrastruktur yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan nelayan dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang ada. Sarana dan prasarana yang ada pada PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) belum memenuhi standar operasional. Untuk itu diperlukan peran pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam penyempurnaan secara bertahap

[32] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[33] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

pembangunan dan pengembangan infrasturktur, sarana dan prasarana usaha perikanan melalui APBN dan APBD Kota Palopo, maupun sumber dana lainnya.

b. Pelaksanaan

1. Memfasilitasi dan Membiayai dalam Membuat Rumah dan Sertifikat Tanah

Dinas perikanan dalam rangka meningkatan pendapatan nelayan adalah dengan mefasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat rumah dan sertifikat tanah.. Jadi dengan program ini nelayan yang sebelumnya kesulittan untuk mengakses pinjaman dari lembaga keunangan bank maupun non bank karena tidak memiliki jaminan, bisa menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan untuk syarat pembiayaan dari bank ,maupun lembaga non bank[34]

Melalui upaya sertifikasi hak atas tanah diharapkan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha. Dengan adanya tambahan modal usaha dapat meningkatkan usaha nelayan dan melakukan pengembanagan ekonomi produktif lainnya.

Langkah yang diambil Pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah strategi parsial dimana strategi ini berkaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran pendapatan dan belanja menurut sasaran kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kasus ini pemerintah mengalokasikan dananya untuk mengadakan program memfasilitasi dan membiayai nelayan dalam membuat perahu dan membeli alat tangkap yang akan mempermudah nelayan meningkatkan pendapatannya.

[34] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Masyarakat Nelayan.

Salah satu bentuk upaya Dinas Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, menumbuh kembangkan kewirausahaan nelayan adalah melalui penyedian bantuan terhadap nelayan berupa alat seperti mesin, perahu, pukat, jaring ikan. bibit ikan.[35]

Dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo bekerja sama dengan koperasi, pertanian, dan dinas sosial memberikan bantuan langsung kepada nelayan berupa peralatan tangkap ikan. Dengan adanya pemberian bantuan langsung yang berupa sarana penagkapan ikan dan sarana pendukung lainya pendapatan nelayan akan bertambah, karena pada dasarnya sumber daya di lautan adalah sumber daya bersama. Pada sumber daya bersama mereka yang memiliki kemampuan yang lebihg dari segi manusia maupun dari segi alat yang bisa mendapatkan hasil yang maksimal.[36]

Setelah memberikan bantuan dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok nelayan yang diberi bantuan. Dinas Kelautan dan Perikanan membina nelayan mulai dari administrasi, manajemen dan dari segi keuangan. Pembinaan yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Palopo bertujuan agar nelayan bias memaksimalkan pendapatan yang dia miliki.[37]

Strategi kebijakan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Dengan pemberian sarana dan prasarana untuk melaut akan meningkatkan kemampuan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak yang akan dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

Kebijakan yang dilakukan Dinas kelautan dan Perikanan termasuk kebijakan yang memiliki visi ke depan dan mempunyai dimensi yang luas karena

[35] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[36] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[37] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

tidak didedikasikan hanya untuk kepentingan sesaat. Dengan memberikan bantuan terhadap nelayan berupa alat yang dapat membantu nelayan menangkap ikan bukan hanya membantu mereka untuk sementara tetapi kedepannya akan melakukan kemampuan yang mereka miliki dalam menangkap ikan yang hasil dapat terjadinya peningkatan pendapatan mereka.

3. Melakukan Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat Nelayan.

Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap nelayan. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pemerintah sesuai dengan kewenangnya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kmpetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.[38]

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan terhadap nelayan yang menerima bantuan, baik dari bantuan alat tangkap yang diperuntukkan untuk nelayan yang belum memiliki alat tangkap maupun untuk kelompok usaha bersama yang mendapatkan bantuan langsung berupa sarana dan prasarana menangkap ikan.[39]

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pendampingan dengan cara membimbing nelayan dari segi teknis, dan membimbing nelayan yang menerima bantuan supaya agar bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya yang akan berdampak pada peningktan pendapatan nelayan.[40]

---

[38] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

[39] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[40] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

Strategi kebijakan untuk melakukan pembinaan kepada nelayan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo merupakan kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan. Dengan adanya pembinaan nelayan bisa meningkatkan kemampuan mereka dari segi teknis agar mahir dalam melakukan penangkapan ikan.

c. Evaluasi

Pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mengevaluasi semua program-program yang telah diberikan kepada nelayan. Hasil menunjukkan sebagian besar program sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Terdapat sebagian kecil perencanaan program yang tidak terealisasikan, yaitu pada kegiatan pembinaan dan pembimbingan masyarakat nelayan dimana ada sebagian masyarakat nelayan yang tidak dapat mengikuti pelatihan. Pada kegiatan penyediaan infrastruktur, serta sarana dan prasarana perikanan berupa fasilitas alat tangkap nelayan sudah sebagian terealisasi.[41]

2. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan*

Menurut penulis melakukan strategi kebijakan pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan dengan mempermudah mempermudah nelayan melalui program memfasilitasi dan membiayai untuk membeli alat tangkap. Penyediaan sarana dan prasarana masyarakat nelayan melalui pemberian bantuan kepada nelayan merupakan strategi kebijakan yang sesuai dengan ekonomi Islam. Apa yang pemerintah oleh Dinas kelautan dan Perikanan Kota Palopo lakukan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketika rakyatnya mengalami masalah

[41] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

dalam ekonomi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menambah kesejahteraan rakyatnya.

Dengan membantu nelayan yang sedang mengalami masalah dalam mencari ikan sebagai sumber reski, apa yang dilakukan pemerintah Kota Palopo sesuai dengan ekonomi Islam. Hal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan ekonomi rakyatnya.[42]

Islam mengajarkan bahwa setiap kebijaksaan, keputusan, peraturan, perundangan undangan yang dibuat oleh lembaga negara harus memuat hal yang dapat memelihara dan mewujudkan kemaslahatan rakyat.[43]

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Terjemahnya:

"Tindakan atau kebijaksanaan kepala Negara terhadap rakyatnya tergantung kemaslahatan."

Tindakan kebijaksanaan kepala negara dan para pejabat negara harus menyesuaikan dengan keputusan peraturan dan perundang-undangan yang akan berimbas pada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaan ini akan menimbulkan keinginan dan kreatifitaas rakyat untuk memenuhi kesejahteraan sendiri.

Kebijakan strategi yang dikeluarkan pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo untuk memfasilitasi dan membiayai alat tangkap, memberikan bantuan kepada kepada kelompok nelayan, dan melakukan pembinaan terhadap rakyat dimana dalam hal ini nelayan sebagai objek kebijakan tersebut. Kebijakan untuk memfasilitasi dan membiayai alat tangkap nelayan

---

[42] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[43] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37

menimbulkan kemaslahatan untuk nelayan, dengan program tersebut nelayan tidak kesulitan untuk membeli alat tangkap tersebut. Kebijakan pemberian bantuan kepada kelompok nelayan menimbulkan kemaslahatan kepada nelayan karena dengan program tersebut meningkatkan kemampuan nelayan dalam mencari ikan di laut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program untuk mendampingi dan memberi pendidikan kepada nelayan memberikan kemaslahatan kepada nelayan. Dengan mendidik nelayan dari segi manajemen maupun dari segi pengaturan keuamgam menambah kemampuan nelayan dalam pengelolaan hasil pendapatan mereka.

Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap kebijakan strategi kebijakan pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan perspektif ekonomi Islam, dapat di simpulkan bahwa menurut penulis strategi penerapan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

3. *Kendala dan Solusi Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan*

Setiap pekerjaan pasti memiliki kendala dan masalah banyak persoalan yang dihadapi oleh seseorang dalam melakukan kegiatannya sehari-hari contohnya dalam melakukan usaha-usaha dalam meningkatkan pendapatannya. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh kelompok nelayan adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang rendah karena tingkat pendidikan mereka pada umumnya hanya lulusan atau tidak tamat sekolah dasar. Tingkat

pendidikan rendah disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, dan kesadaran pendidikan yang kurang.

Adapun kendalanya lagi yaitu program pelatihan dan pembimbingan kelompok nelayan terkadang banyak yang tidak memiliki waktu untuk mengikutinya dan beralasan ketika mereka mengikuti pembinaan maka mereka otomatis tidak akan melaut dan tidak akan mendapatkan pengahasilan.[44]

Solusi yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan yaitu dengan melakukan pembinaan dan bimbingan peningkatan kapasitas SDM untuk menambah pengetahuan kelompok nelayan baik dalam penangkapan maupun pengolahan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan kemudahan untuk kelompok nelayan yang membutuhkan bantuan seperti alat tangkap, mesin, perahu serta sarana dan prasarana hal ini dilakukan agar kelompok nelayan tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya.[45]

Selain itu, agar upaya peningkatan pendapatan nelayan ini dapat berjalan secara optimal maka pemerintah harus berlaku adil, transparansi, serta selektif dalam upaya peningkatan pendapatan nelayan yang akan dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal ini melakukan penyuluhan serta pelatihan-pelatiahan. Seperti yang dijelaskan dalam AlQur'an Surah Al-Maidah/5:8: sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

> *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu*

[44] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

[45] Wawancara dengan bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Strategi kebijakan pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan ada tiga tahapan yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan ke depan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo adalah perikanan budidaya yang seharusnya dikembangkan agar pendapatan nelayan dapat meningkat.

b. Pelaksanaan

Pertama, dengan cara menfasilitasi dan membiayai dalam membuat rumah dan sertifikat tanah. Kedua, penyediaan sarana dan prasarana berupa mesin, perahu, pukat, jaring ikan. bibit ikan. Ketiga, melakukan pembinaan dan bimbingan.

c. Evaluasi

Pemerintah oleh Dinas Kelautan dan Perikanan mengevaluasi semua program-program yang telah diberikan kepada nelayan. Hasil menunjukkan sebagian besar program sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

2. Dalam persfektif ekonomi Islam merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya dimana kebijakan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

3. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Kedua, program pelatihan kelompok nelayan terkadang banyak yang tidak memiliki waktu untuk mengikutinya.

Solusinya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan yaitu dengan melakukan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas SDM untuk menambah pengetahuan kelompok nelayan baik dalam penangkapan maupun pengolahan.

B. *Saran*

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan program secara terstruktur agar kelompok nelayan lebih semangat dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas SDM tersebut.
2. Agar upaya peningkatan pendapatan nelayan terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan kelompok nelayan mengenai pemberian bantuan seperti adanya kegiatan musyawarah untuk menentukan bantuan yang diperlukan, karena nelayan merasa adanya ketidak sesuaian antara bantuan dengan kebutuhan nelayan sehingga menghambat peningkatkan pendapatan nelayan tersebut.
3. Diharapkan kepada kelompok nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatannya tentunya harus bisa mengatur antara pengeluaran dan pendapatannya serta belajar menabung untuk keperluan mendadak atau sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Alfentino, Lamia Karof," *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Nelayan Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*" ,(Jurnal Emba Vol.1 No.4 Desember 2013), h. 1758 diakses dari *http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/3371* pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 15.05.

Arikunto, Suharisimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 107

Chapra, Umer *Islam and Economic Development*, (Islamabad Islamic Research Institute Pres: 1993), h. 93

-------, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Surabaya: Risalah Gusti 1999), h. 229-230

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Palopo Tahun 2018

Fathoni, Noor Aliza" Strategi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Cilacap, (Studi Kasus pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan Kabupaten Cilacap)", (Purwokerto: Institutr Agama Islam Negeri (IAIN), 2015), h 5.

Fauzi, Akhmad, *EkonomiPerikanan* Jakarta: GramediaPustakaUtama 2010, h. 7

------- *Kebijakan Perikanan dan Kelautan : Issue, Syntesis, dan Gagasan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 9

Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, h. 19

Isnaini, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamdia Group, 2015), h. 84.

Iriantara, Y. *Manajemen Strategik Public Relations.* Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 43

Imron, Hs Ali," Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang dalam Menghadapi Perubahan Iklim", (Jurnal Riptek Vol. 6, No.I, Tahun 2012), h. 36 diakses dari *http://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Strategi_dan_Usaha_Peningkatan_Kesejahteraan_Hidup_Nelayan_Tanggulsari_Mangunsari_Tugu_Semarang_dalam_Menghadapi_Perubahan_Iklim_-_ALI_IMRON_HS.pdf* pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 19.05.

Jamal, Badrul, "*Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan, (Studi Nelayan Pesisir Desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)*", (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 4 diakses dari *jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/10 26* pada tanggal 08 Juli 2018 pukul 13.24.

J. David, Hunger dan Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis;* alih Bahasa Julianto Agung S. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, h. 89

Kuncoro, Mudrajat. Ph.D, *Masalah, Kebijakan, dan Politik; Ekonometrika Pembangunan,* (Jakarta: Penerbit Erlangga 2010), h. 23-24

Kusnadi. *Pemberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil. Lembaga Penelitian Universitas Jember. Jember: Universitas Jember, h. 152

Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kota Palopo Tahun 2017-2018.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil

Rachmat. *Manajemen Strategik.* Bandung: CV. Pustaka Setia, h. 97

Rangkuti, F. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 132

Retnowati, E. Nelayan Indonesia Dalam PusaranKemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Hukum). *Perspektif,* XVI (3), h. 149-159

Ridwan, *Belajar Mudah penelitian* Bandung: Alfabeta, 2011, h. 69

Sedarmayanti, M. Manajemen Strategi. Bandung: PT. Refika Aditama, h.76

Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 69

Sujarno, *"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Langka*t ".Thesis (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2008) diakses dari *repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7165/1/09E00282.pdf* pada tanggal 09 Juli 2018 pukul 14.25.

Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 132

Supriono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis,* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. 1998), h. 8

Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 37

Wawancara dengan Bapak Syamsuddin Bidang Perikan Tangkap Seksi Pencatatan dan Usaha Penangkapan Ikan. Palopo 28 Juni 2019

LAMPIRAN

DINAS PERIKANAN KOTA PALOPO

WAWANCARA DENGAN BAPAK SYAMSUDDIN BIDANG PERIKANAN TANGKAP SEKSI PENCATATAN DAN PENANGKAPAN IKAN. PALOPO 28 JUNI 2019

PENGAMBILAN DATA LAPORAN TAHUNAN DINAS PERIKANAN